



**PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Jln. Lawu No. 85 Telepon (0271) 495038 Fax. 494038

Website : www.karanganyar.go.id E-mail : kesbangpol@karanganyarkab.go.id Kode pos 57716

**KEPUTUSAN
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN KARANGANYAR**

Nomor : / //I/ Tahun 2019

TENTANG

**RENCANA STRATEGIS BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2013 - 2018**

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN KARANGANYAR**

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya pembinaan persatuan dan kesatuan Bangsa, Politik serta Kewaspadaan Masyarakat, maka dipandang perlu menetapkan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Karanganyar;
- b. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 2008;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pembinaan Keuangan antara Pusat dan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang penanganan bencana;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa serta Pembinaan Perlindungan Masyarakat di Daerah seluruh Indonesia;.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor II tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar nomor 3 tahun 2009 tentang Struktur Organisasi lembaga Teknis Kabupaten Karanganyar;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karanganyar tahun 2013-2018;
12. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 9 tahun 2009 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan struktural pada Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Karanganyar;
13. Perda No 3 tahun 2009 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Karanganyar;
14. Peraturan Daerah No 9 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kab.Karanganyar No 3 tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah m, Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- KESATU** : Menyusun Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karanganyar Tahun 2013 - 2018
- KEDUA** : Pelaksanaan Pembangunan Bidang Kesatuan Bangsa, Politik dan Kewaspadaan Masyarakat serta Kesekretariatan Bangsa Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karanganyar berpedoman kepada Keputusan di maksud diktum KESATU.
- KETIGA** : Biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2014
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku Tanggal

Ditetapkan di Karanganyar

Pada tanggal Februari 2019

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN KARANGANYAR**

Agus Cipto Waluyo

Salinan keputusan ini disampaikan Kepada :

1. Yth. Bupati Karanganyar;
2. Yth. Kepala Bappeda Kab. Karanganyar;
3. Yth. Inspektur Kab. Karanganyar ;
4. Yth. Kepala DPPKAD Kab. Karanganyar;

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai Renstra yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Ketentuan tersebut diperkuat dalam Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karanganyar merupakan bagian dari pembangunan Pemerintah Kabupaten Karanganyar yang merupakan integral dari pembangunan nasional yang dilakukan secara terus menerus untuk menuju perubahan yang lebih baik.

Pasal 5 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 dinyatakan bahwa RPJMD merupakan penjabaran visi, misi dan program Kepala Daerah. Dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2013-2018. Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karanganyar, merupakan bagian Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJD) Kabupaten Karanganyar yang mendasarkan RPJM Nasional, memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan Program Satuan Kerja Perangkat Daerah, Lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Didalam RPJMD tersebut terdapat Visi Kabupaten Karanganyar yaitu “Bersama membangun Karanganyar”, sedang misi Kabupaten Karanganyar adalah sebagai berikut :

1. Pembangunan infrastruktur menyeluruh
2. Penciptaan 10.000 wirausahawan mandiri
3. Pendidikan gratis (SD,SMP,SMA) dan kesehatan gratis
4. Pembangunan Desa sebagai pusat pertumbuhan
5. Peningkatan kualitas keagamaan, sosial dan budaya

Misi (5) menekankan pentingnya peningkatan partisipasi masyarakat dan lembaga sosial dalam pembangunan kualitas keagamaan, sosial dan budaya demi terciptanya masyarakat yang rukun, damai dan demokratis dalam beragama, sosial dan budaya dalam persatuan dan kesatuan sehingga kesejahteraan secara menyeluruh dapat segera terwujud

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum sebagai dasar penyusunan RPJMD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karanganyar adalah sebagai berikut :

1. Ketetapan MPR RI Nomor XI / MPR/1998 tentang penyelenggaraan Negara yang bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Instruksi presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara;
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana pembangunan Daerah;

1.3 Maksud dan Tujuan

1 Maksud

Maksud penyusunan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karanganyar, adalah :

- a. Pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karanganyar dalam melaksanakan keselarasan perencanaan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi terhadap pembaharuan yang terjadi.
- b. menyiapkan dokumen perencanaan pembangunan 5 (lima) tahun dengan berdasarkan pada kondisi, permasalahan, potensi, dan prioritas serta kebutuhan daerah bagi pembangunan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.

2 Tujuan

Tujuan disusunnya Renstra Kabupaten Karanganyar, adalah :

- a. Memantapkan terselenggaranya kegiatan-kegiatan prioritas sesuai visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi yang ingin dicapai oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik periode 5 (lima) tahun kedepan yang disesuaikan dengan dinamika, tuntutan dan perubahan yang terjadi dimasyarakat, serta sinkronisasi perencanaan pembangunan secara menyeluruh dan terintegrasi dalam mendukung kebijakan pembangunan daerah
- b. Terciptanya perumusan kebijakan Skala prioritas pembangunan bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik pada kurun waktu Tahun 2013 S/d 2018.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karanganyar disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

BAB V RENCANA PROGRAM KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

BAB VII PENUTUP

LAMPIRAN

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Tugas Pokok Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karanganyar adalah sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 49 Tahun 2011 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Jabatan Struktural pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karanganyar.

Adapun Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karanganyar adalah sebagai berikut :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
 - a. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik
 - b. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala Badan mempunyai fungsi :
 - 1) Perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik;
 - 2) Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang kesatuan bangsa dan politik yang meliputi kesatuan bangsa, politik, kemasyarakatan dan kewaspadaan daerah, serta kesekretariatan;
 - 3) Pembinaan pelaksanaan tugas dibidang kesatuan bangsa dan politik yang meliputi kesatuan bangsa, politik, kemasyarakatan dan kewaspadaan daerah, serta kesekretariatan;
 - 4) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan kegiatan perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian di lingkungan Badan

- a. Kepala Sub Bagian Perencanaan

Kepala Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam menyusun program kegiatan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kegiatan Badan.
 - b. Kepala Sub Bagian Keuangan

Kepala Sub Bagian keuangan mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan urusan administrasi keuangan dan pelaporan pertanggungjawaban keuangan Badan.
 - c. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan pengelolaan urusan administrasi umum, rumah tangga, perlengkapan/perbekalan, dokumentasi, perpustakaan dan kearsipan, serta pengelolaan administrasi kepegawaian Badan.
3. Kepala Bidang Kesatuan Bangsa
- Kepala Bidang Kesatuan Bangsa mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan kegiatan dibidang kesatuan bangsa.
- a. Kepala Sub Bidang Bina Idiologi dan Wawasan Kebangsaan

Kepala Sub Bidang Bina Idiologi dan Wawasan Kebangsaan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Kesatuan Bangsa dalam merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan kegiatan bina ideologi dan wawasan kebangsaan.
 - b. Kepala Sub Bidang Kerukunan Antar Umat Beragama dan Aliran Penghayat Kepercayaan.

Kepala Sub Bidang Kerukunan Antar Umat Beragama dan Aliran Penghayat Kepercayaan membantu Kepala Bidang Kesatuan Bangsa dalam merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan kegiatan kerukunan umat beragama dan aliran kepercayaan.

4. Kepala Bidang Politik dan Kemasyarakatan.

Kepala Bidang Politik dan Kemasyarakatan mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan kegiatan dibidang Politik dan Kemasyarakatan.

a. Kepala Sub Bidang Hubungan Antar Lembaga.

Kepala Sub Bidang Hubungan Antar Lembaga mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Politik dan Kemasyarakatan dalam merumuskan kebijakan , mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan kegiatan hubungan antar lembaga.

b. Kepala Sub Bidang Demokratisasi dan Masalah Aktual.

Kepala Sub Bidang Demokratisasi dan Masalah Aktual mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Politik dan Kemasyarakatan dalam merumuskan kebijakan , mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan kegiatan demokratisasi dan masalah aktual.

5. Kepala Bidang Kewaspadaan Daerah dan Ketahanan Masyarakat.

Kepala Bidang Kewaspadaan Daerah dan Ketahanan Masyarakat mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan kegiatan di bidang kewaspadaan daerah dan ketahanan masyarakat

a. Kepala Sub Bidang Kewaspadaan Dini, Pengawasan Orang dan Lembaga Asing.

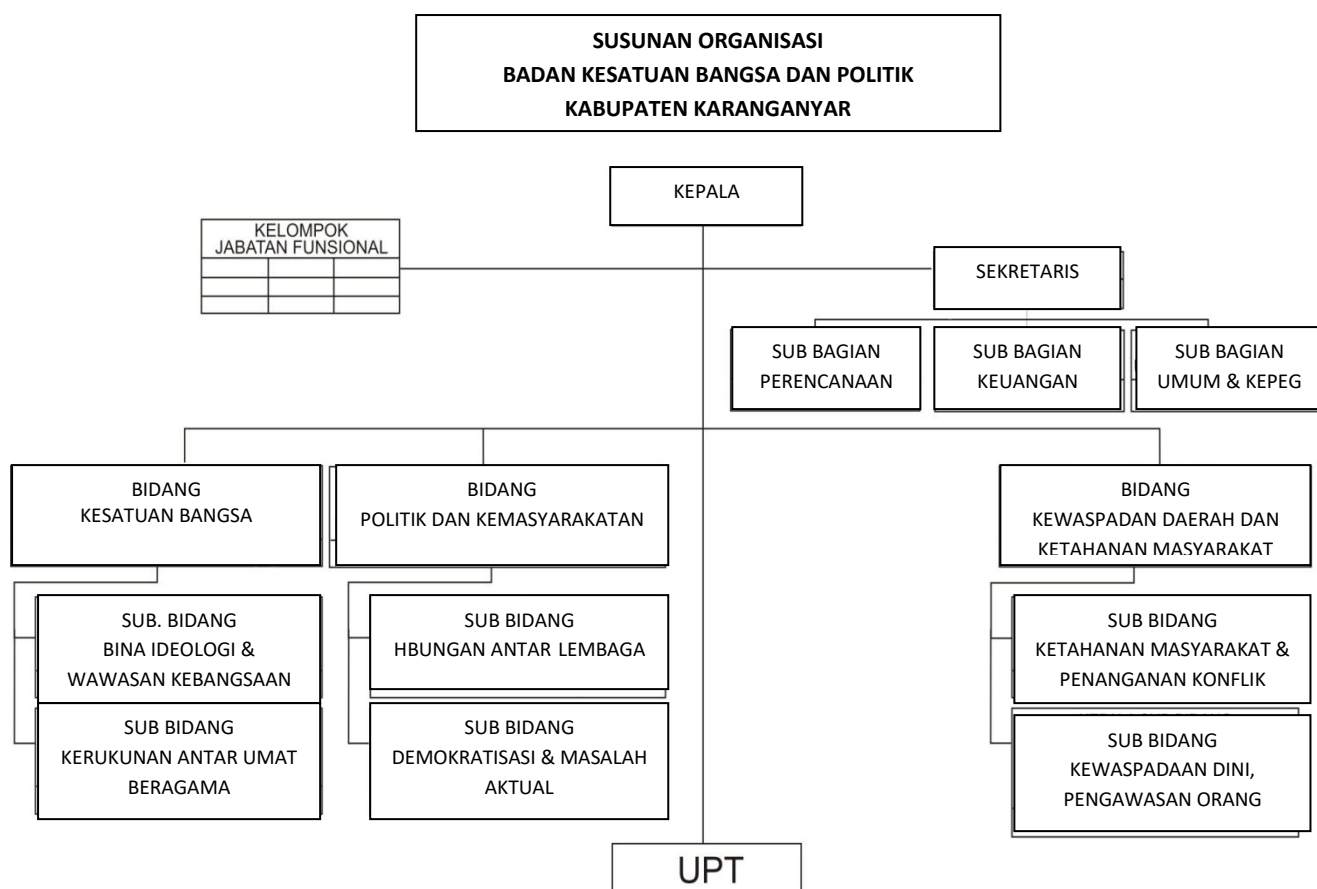
Kepala Sub Bidang Kewaspadaan Dini, Pengawasan Orang dan Lembaga Asing mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Kewaspadaan Daerah dan Ketahanan Masyarakat dalam merumuskan kebijakan , mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan kegiatan kewaspadaan dini dan pengawasan orang dan lembaga asing.

b. Kepala Sub Bidang Ketahanan Masyarakat dan Penanganan Konflik.

Kepala Sub Bidang Ketahanan Masyarakat dan Penanganan Konflik mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Kewaspadaan Daerah dan Ketahanan Masyarakat dalam merumuskan kebijakan , mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan kegiatan ketahanan masyarakat dan penanganan konflik.

Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sesuai dengan PERDA No.9 Tahun 2011 adalah sebagai berikut:



2.2 Sumber Daya Manusia Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Jumlah dan Status Kepegawaian

Jumlah pegawai dan status kepegawaian Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karanganyar bulan Desember 2018 sebanyak 37 orang. Jumlah tersebut terdiri dari 25 orang pegawai negeri sipil (PNS) dan 12 orang tenaga kontrak. Dari 37 orang pegawai tersebut, sebanyak 29 orang laki-laki dan 8 orang perempuan.

Tabel 2.1
Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Karanganyar Menurut Struktur dan Bidang

Bidang dan Bagian	Jumlah
Kepala Badan	1
Sekretaris	1
1. Sub Bagian Perencanaan	1

Bidang dan Bagian	Jumlah
2. Sub Bagian Keuangan	3
3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	4
Kepala Bidang Kesatuan Bangsa	1
1. Sub Bidang Kerukunan Antar Umat Beragama dan Aliran Penghayatan Kepercayaan	2
2. Sub Bidang Bina Idiologi dan Wasbang	2
Kepala Bidang Politik Kemasyarakatan	-
1. Sub Bidang Demokratisasi dan Masalah Aktual	2
2. Sub Bidang Hubungan Antar Lembaga	3
Kepala Bidang Kewaspadaan Daerah & Ketahanan Masyarakat	1
1. Sub Bidang Kewaspadaan dini, Pengawasan orang dan Lembaga Asing	2
2. Sub Bidang Ketahanan Masyarakat dan Penanganan Konflik	2

b. Status Pendidikan dan Golongan Kepegawaian

Berdasarkan tingkat pendidikan, dari 25 orang PNS yang bekerja di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karanganyar, sebanyak 8 orang pegawai berpendidikan Strata 2 (Pasca Sarjana), 14 orang berpendidikan Strata 1 (sarjana), 1 orang berpendidikan Diploma 3, dan 2 orang berpendidikan SLTA.

Tabel 2.2

Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karanganyar
Menurut Pendidikan

Jenjang Pendidikan	Jumlah
Strata 2	14
Strata 1	8
Diploma 3	1
SLTA	2
Total	25

Sedang berdasarkan golongan kepegawaian dari 25 orang PNS, terdiri dari Golongan II 1 orang; Golongan III 18 orang; Golongan IV 6 orang;

Tabel . 2.3
Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karanganyar
Menurut Kepangkatan

Golongan II	Jumlah	Golongan III	Jumlah	Golongan IV	Jumlah
II/a	-	III/a	1	IV/a	6
II/b	-	III/b	1	IV/b	1
II/c	-	III/c	3	IV/c	1
II/d	1	III/d	11	IV/d	
	1		16		8

2.3 Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karanganyar bersama Pemerintah Daerah Karanganyar telah menyelenggarakan pelaksanaan dibidang pencegahan potensi masalah di masyarakat sesuai tugas pokok dan fungsi yang didukung peran aktif masyarakat untuk mencapai dan mewujudkan persatuan dan kesatuan yang demokratis dalam berbangsa dan bernegara.

Hasil kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang sifatnya pencegahan terjadinya potensi konflik antara lain :

1. Terlaksananya pemantauan organisasi terlarang.
2. Terlaksananya penanganan masalah aktual.
3. Terlaksananya pemantauan terjadinya unjuk rasa dan audiensi.
4. Terlaksananya fasilitasi hubungan kerja dan pendataan organisasi, aliran penghayat kepercayaan kepada Tuhan YME.
5. Terlaksananya pendidikan pendahuluan bela negara.
6. Terlaksananya forum wawasan kebangsaan.
7. Terlaksananya temu fikir remaja dan koordinasi pembinaan pemuda dan remaja
8. Terlaksananya pendidikan politik masyarakat.

Keberhasilan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menjalankan program-program RPJMD Kabupaten Karanganyar tidak lepas dari peran serta masyarakat yang aktif, hal tersebut sangat membantu bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam merealisasikan semua rencana yang telah tersusun yang pada akhirnya dapat mewujudkan Kabupaten Karanganyar yang tenteram dan damai tanpa gejolak.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

Berdasarkan perkembangan kondisi pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam kurun waktu 3 tahun terakhir, dipetakan beberapa hal yang menjadi tantangan bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik selama tahun 2013 – 2018 terkait dengan tugas pokok dan fungsinya secara garis besar adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Tantangan bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah menjalin koordinasi lintas sektor terkait yaitu Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Kantor Satpol PP, Polri dan juga lembaga terkait Kabupaten perbatasan yang solid sebagai upaya mengantisipasi adanya gangguan ketertiban; dan menjalin kerjasama dengan masyarakat untuk melembagakan rasa peduli keamanan dan ketertiban masyarakat, sehingga bisa diantisipasi atau mengurangi tantangan munculnya gangguan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat. Hal ini mengingat dalam era globalisasi ini aksi teroris dan penyebaran ideologi ekstrim tidak mengenal batas administratif, sehingga perlu diwaspadai adanya kehadiran entitas yang potensial menimbulkan keresahan masyarakat.

2. Terwujudnya partisipasi masyarakat dalam kehidupan berpolitik dan berdemokrasi.

Tertanamnya kesadaran masyarakat yang tinggi baik dari sisi pentingnya peran masyarakat dalam menentukan masa depan arah pembangunan maupun kesadaran untuk mewujudkan situasi yang kondusif dalam rangka mendukung penyelenggaraan kehidupan politik yang lebih demokratis. Tantangan yang dihadapi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah bagaimana secara substantif memberi ruang partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

3. Hal-hal lain yang dianggap perlu

Selain kedua tantangan tersebut diatas ada hal-hal lain yang perlu yang terkait dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik antara lain Badan Narkotika Kabupaten (BNK), Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) dan juga Komunitas Intelejen Daerah (Kominda) dimana ketiga lembaga tersebut menginduk pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Badan Narkotika Kabupaten (BNK) sangat diperlukan dalam era saat ini dimana penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba sudah sangat membahayakan kehidupan masyarakat, tetapi karena keterbatasan

anggaran daerah sehingga lembaga tersebut belum dibentuk tersendiri. Dalam meningkatkan kualitas kehidupan dan kerukunan antar umat beragama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik juga memfasilitasi terbentuknya FKUB dimana lembaga ini bertugas membantu Bupati dalam memberikan rekomendasi tertulis atas permohonan pendirian rumah ibadah. Sedangkan Komunitas Intelejen Daerah (Kominda) adalah lembaga yang dibentuk untuk membantu Bupati dalam rangka pemantauan situasi kondisi daerah lebih dini yang bersifat rahasia untuk mencegah terjadinya sesuatu yang membahayakan.

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARAKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karanganyar berdasarkan pada Peraturan Pemerintah No 58 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan pemerintah No. 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota , Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan menteri Dalam Negeri No 59 tahun 2007 Tentang Perubahan atas peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Berdasarkan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 49 Tahun 2011 Tentang Uraian Tugas dan fungsi jabatan Struktural pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas Pokok dan Fungsi sebagai berikut :

1. Tugas pokok

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik, merumuskan kebijakan teknis perencanaan, koordinasi, pengawasan dan pengendalian teknis bidang kesatuan bangsa dan politik serta pembinaan, bimbingan teknis, pengelolaan administrasi, pengelolaan ketatausahaan badan kesatuan bangsa dan politik.

2. Fungsi

Merumuskan Program kegiatan badan kesatuan bangsa dan politik berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;

- a. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan masukan , informasi serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
- b. Merumuskan kebijakan Bupati di bidang kesatuan bangsa dan politik sesuai dengan peraturan perundang –undangan yang berlaku ;
- c. Mengkoordinasikan kegiatan di bidang kesatuan bangsa dan politik sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku;

- d. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan di bidang kesatuan bangsa dan politik sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku ;
- e. Membina pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- f. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di bidang kesatuan bangsa dan politik ;
- g. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati sebagai dasar pengambilan keputusan;
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah Terpilih

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih Kabupaten Karanganyar untuk masa jabatan 2013 – 2018 membawa visi dan misi baru untuk memberikan perubahan pada Kabupaten Karanganyar kedepan.

Visi dari Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih adalah **“Bersama Memajukan Karanganyar”**. Sedangkan Misi-misinya untuk mewujudkan visi dari Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih adalah:

1. Pembangunan Infrastruktur Menyeluruh

Pembangunan fisik dan infrastruktur yang memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan lainnya. Pembangunan infrastruktur di arahkan pada sarana dan prasarana untuk meningkatkan pertumbuhan dan kelancaran roda perekonomian dengan memperhatikan aspek keseimbangan dan kelestarian lingkungan hidup serta tata ruang daerah.

2. Penciptaan 10.000 Wirausahawan Mandiri

Berkurangnya pekerja pada perusahaan mengakibatkan banyaknya angkatan kerja yang tidak tertampung, padahal fenomena ini setiap tahun meningkat. Maka untuk mengurangi angka pengangguran perlu ditumbuhkan semangat untuk berusaha mandiri disamping untuk diri pribadinya diharapkan dapat membuka lapangan kerja. Usaha mandiri dapat dilakukan di beberapa sektor antara lain sektor pertanian, sektor peternakan, jasa dan lain sebagainya. Maka peran pemerintah untuk menciptakan wirausahawan mandiri dapat dilakukan dengan

pemberian pendidikan teknologi tepat guna, pemasaran dan bantuan stimulan sebagai modal awal untuk membuka usaha.

3. Pendidikan gratis SD, SMP, SMA, dan Kesehatan Gratis

Seperti diamanatkan dalam UUD 1945 setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan, maka dengan kebijakan dengan adanya wajib belajar bagi masyarakat, pemerintah dapat memberikan pada setiap warganya untuk mengenyam pendidikan. Kesulitan ekonomi yang menghambat warga yang wajib belajar dapat teratasi dengan mengoptimalkan anggaran yang ada guna memberikan pendidikan murah.

Setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan, maka pemerintah sudah selayaknya menyediakan sarana dan prasarana kesehatan yang baik serta memadai

4. Pembangunan Desa sebagai pusat pertumbuhan

Desa merupakan pusat pemerintahan terbawah, maka sudah selayaknya mendapatkan perhatian khusus baik pembangunan fisik maupun non fisik. Perekonomian harus digalakkan dari desa, tersedianya sumber daya aparat yang baik, serta terciptanya kesatuan dan persatuan kehidupan masyarakat.

5. Peningkatan kualitas keagamaan, sosial dan budaya

Perbedaan keyakinan bukan menjadi penyebab keretakan dan memudarnya semangat kehidupan kekeluargaan dimasyarakat. Perbedaan merupakan rahmat yang harus disyukuri, hal ini akan menumbuhkan rasa saling hormat menghormati. Peningkatan kualitas keagamaan, sosial, dan budaya maka akan dapat menumbuh kembangkan semangat kekeluargaan serta persatuan dan kesatuan.

Sedangkan Visi dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karanganyar “Terwujudnya Masyarakat Yang Demokratis Dalam Menjalin Kesatuan Dan Persatuan ” dan Misi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah merupakan serangkaian tindakan yang lebih nyata atau sesuatu yang harus diemban untuk mencapai visi.

Oleh karena itu mengacu pada visi tersebut maka disusunlah suatu misi sebagai berikut :

1. Menyusun kebijakan bidang kesatuan bangsa dan politik serta kesekretariatan;

2. Mengkoordinasikan fasilitasi dan pembinaan kegiatan bidang kesatuan bangsa dan politik serta kesekretariatan;
3. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang kesatuan bangsa dan bidang serta kesekretariatan;

Mengacu dari Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih program-program Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah sesuai dengan butir misi lima (5) Peningkatan kualitas keagamaan, budaya dan soial dan program kegiatannya adalah sebagai berikut:

Peningkatan kualitas keagamaan, sosial dan budaya

Untuk peningkatan kualitas keagamaan, sosial dan budaya diperlukan pemberdayaan semua elemen maupun lembaga yang ada dimasyarakat termasuk lembaga adat istiadat dan sosial budaya. Usulan rumusan penjelasan misinya, pembinaan dan pengembangan nilai nilai adat istiadat sebagai aset yang memiliki potensi mencegah konflik yang dapat menjadi peluang peningkatan ekonomi, jauh dari masalah konflik yang akhir-akhir ini sering terjadi, misalnya konflik antara buruh dengan pemilik perusahaan, antara pemilik perusahaan dengan pemilik lahan sekitar perusahaaan, dengan suasana yang jauh dari konflik diharapkan kinerja ekonomi baik yang dilakukan pemilik modal besar maupun usaha kecil dapat tenang dalam berusaha sehingga berdampak positif pada peningkatan ekonomi masyarakat. Dibidang budaya. Bidang budaya akan berjalan dan tumbuh subur apabila kondisi suatu wilayah terjamin keamanannya dalam arti jauh dari berbagai konflik, bahkan tidak jarang berawal aktifitas budaya dapat menjadi sarana peningkatan ekonomi.

Indikasi program yang dilaksanakan untuk menunjang visi, misi Bupati yang baru di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik diantaranya : Pelaksanaan kegiatan fasilitasi kerukunan antar umat beragama, temu fikir pemuda dan remaja tentang rasa nasionalisme, penanganan masalah aktual, fasilitasi keamanan umum dan lain-lain.

Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Dalam pelaksanaan rencana kerja pemerintah daerah berpedoman dari Renstra SKPD yang mengacu dari Visi dan Misi Kepala Daerah, selain itu juga ada sasaran jangka menengah dari pemerintah pusat yang telah terbagi dikementerian-kementerian yang membidanginya. Program-program kerja yang disusun dan dilaksanakan oleh Badan Kesatuan

Bangsa dan Politik memiliki keterkaitan dan menunjang program dari pemerintah pusat.

Demi keberhasilan pembangunan di daerah pemerintah pusat memberikan garis-garis besar arahan pembangunan kepada pemerintah daerah, hal itu mutlak diperlukan guna tercapainya stabilitas keamanan, pemerataan pembangunan, peningkatan sosial ekonomi dan budaya di daerah sehingga pusat pengembangan dan perekonomian tidak hanya terpusat di satu daerah saja.

3.3 Telaahan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis

Dalam pelaksanaan program kerja yang mengacu pada pembangunan maupun pengembangan infrastruktur wilayah, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik memperhatikan pola tata ruang dan wilayah di semua sektor baik di pedesaan maupun perkotaan sebagai obyek pelaksanaan program kerja. Hal ini berkaitan dengan tupoksi yang ada dimana semua aspek kehidupan masyarakat baik secara sosial budaya maupun berbangsa dan bernegara mencakup semua wilayah dalam arti semua wilayah berpotensi terjadi konflik dan semua wilayah butuh penanganan yang sifatnya pencegahan maupun pembinaan untuk mencegah atau menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.

Penentuan isu-isu strategis

Dalam rangka menentukan tujuan, sasaran dan strategi yang di dalamnya tercakup kebijakan dan program terlebih dahulu ditentukan isu strategisnya. Perumusan isu strategis diawali dengan melihat kondisi eksisting dari masing-masing komponen. Isu strategis digali dan diidentifikasi dari berbagai masalah yang ada pada setiap komponen/aspek, kemudian dirumuskan permasalahan yang paling dominan dan paling krusial. Identifikasi dapat dilakukan juga melalui identifikasi lingkungan, baik internal maupun eksternal kemudian dirumuskan kekuatan, kelemahan, tantangan maupun peluang. Dari hasil analisa tersebut maka isu strategis bidang Kesatuan Bangsa dan Politik dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Kurangnya wawasan kebangsaan dan kerukunan antar umat beragama dan perlunya penguatan Ideologi Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara
2. Belum optimalnya kesadaran dalam partisipasi politik dalam pemilu

3. Masih terjadi kekerasan dan konflik di masyarakat, baik konflik politik dalam pemilu, konflik sosial akibat kesenjangan ekonomi, konflik keagamaan akibat perbedaan paham keagamaan, konflik industrial yang berkaitan upah, dan konflik lahan dan sumber daya alam.

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 Visi dan Misi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

A. VISI

Guna memberikan kepastian arah kebijakan yang ingin diingin dicapai oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karanganyar sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya , Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karanganyar memiliki Visi yaitu : ” ***Terwujudnya Masyarakat Yang Dekmokratis Dalam Menjalin Kesatuan dan Persatuan*** ”.

Yang dimaksud masyarakat adalah sekelompok orang, warga atau penduduk dengan segala kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi.

Yang dimaksud demokratis adalah bebas dalam menentukan setiap langkah dalam bermasyarakat dalam batasan-batasan yang telah disepakati. .

Yang dimaksud menjalin kesatuan dan persatuan adalah suatu kesepakatan untuk saling mengikatkan diri dalam suatu kesatuan tanpa paksaan yang dilandasi rasa kebersamaan.

Arti dari pernyataan Visi ”Terwujudnya Masyarakat Yang Demokratis Dalam Kesatuan dan Persatuan ” adalah bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karanganyar melalui berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan bertekad untuk menjadikan seluruh lapisan masyarakat atau penduduk Kabupaten Karanganyar mempunyai kemauan dan kemampuan untuk bersatu bersama sama menciptakan suasana damai dalam segala aspek kehidupan sehingga Kabupaten Karanganyar jauh dari gejolak baik yang dipicu masalah ekonomi, agama, budaya maupun yang lainnya.

B. MISI

Misi merupakan tindakan nyata yang dilakukan untuk mewujudkan tercapainya visi yang telah ditetapkan. Misi mencerminkan keberadaan serta tugas pokok dan fungsi organisasi . Dalam rumusan misi tersirat tujuan besar yang hendak dicapai organisasi.

Sedangkan **Misi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karanganyar** guna mewujudkan Visi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa melalui pemahan idiologi Pancasila;
2. Mewujudkan ketentraman dan ketertiban di semua wilayah;
3. Mewujudkan masyarakat yang demokratis dalam berpolitik;
4. Meningkatkan pemahaman tentang arti perbedaan dalam keragaman.

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

1. Tujuan

Tujuan adalah pernyataan tentang apa yang perlu dilakukan untuk mencapai/mewujudkan visi, misi dan mengatasi isu yang dihadapi. Idealnya tujuan dirumuskan berasaskan pendekatan spesifik, terukur, dapat dicapai, realistis dan berorientasi hasil dan jangka waktu pencapaian yang jelas

Untuk merealisasikan pelaksanaan misi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik perlu ditetapkan tujuan pembangunan daerah yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Tujuan ditetapkan dalam rangka memberikan kepastian operasionalisasi dan keterkaitan terhadap peran misi yang telah ditetapkan. Tujuan pembangunan bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat sebagai berikut :

- a. Mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat serta situasi daerah yang kondusif untuk menunjang pembangunan daerah.
- b. Terwujudnya peningkatan berdemokrasi dan kemandirian dalam rangka menjaga stabilitas politik dalam negeri.

2. Sasaran

Sasaran yang diharapkan untuk diwujudkan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam kurun waktu 5 tahun mendatang antara lain:

- a. Menurunnya potensi konflik antar kelompok masyarakat, suku, ras dan agama
- b. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam bidang politik dalam negeri

4.3 Strategi dan Kebijakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

A. Strategi

Strategi yang akan ditempuh oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam pembangunan kesatuan bangsa dan politik adalah :

1. Memberdayakan seluruh sumberdaya instansi yang telah ada saat ini;
2. Meningkatkan keamanan dan kenyamanan lingkungan;
3. Meningkatkan wawasan kebangsaan;
4. Meningkatkan Kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan;
5. Meningkatkan Pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan;
6. Meningkatkan pemberantasan penyakit masyarakat;
7. Meningkatkan pendidikan politik masyarakat;

B. Kebijakan

Untuk dapat melaksanakan strategi pembangunan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien serta tepat sasaran maka disusunlah kebijakan sebagai berikut :

1. Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran;
2. Meningkatkan sarana dan prasarana aparatur;
3. Meningkatkan disiplin aparatur;
4. Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur;
5. Meningkatkan pengembangan system pelaporan capaian kinerja keuangan;
6. Meningkatkan keamanan dan kenyamanan lingkungan;
7. Meningkatkan pemahaman Pancasila di kalangan masyarakat utamanya generasi muda;
8. Meningkatkan pemahaman arti pentingnya NKRI;
9. Meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan serta wawasan kebangsaan di masyarakat;
10. Meminimalkan adanya konflik antar masyarakat;
11. Memberdayakan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan;
12. Meminimalkan peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkoba;
13. Meningkatkan proses politik di daerah;
14. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berpolitik;
15. Meningkatkan pemahaman demokrasi di masyarakat

BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,
KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta sebagai operasionalisasi dari strategi dan kebijakan yang ditempuh oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karanganyar maka ditentukanlah program-program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik selama tahun 2013 sampai dengan 2018 yang disesuaikan dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007. Program dan kegiatan tersebut adalah :

A. Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran

Dalam rangka melaksanakan program peningkatan pelayanan administrasi perkantoran, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, listrik
3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan
4. Penyediaan jasa administrasi keuangan
5. Penyediaan alat tulis kantor
6. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
7. Penyediaan komponen listrik / penerangan bangunan kantor
8. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
9. Penyediaan peralatan rumah tangga
10. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
11. Penyediaan makanan dan minuman
12. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
13. Penyediaan jasa pegawai non PNS

B. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung program peningkatan sarana dan prasarana aparatur adalah :

1. Pengadaan kendaraan roda 4 (untuk Kaban dan Ka. Bid)
2. Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor
3. Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional
4. Pemeliharaan rutin / berkala mebelair

5. Pemeliharaan rutin / berkala alat studio komunikasi
6. Pemeliharaan rutin / berkala komputer
7. Pemeliharaan rutin / berkala senjata api
8. Pemeliharaan rutin / berkala peralatan rumah tangga

C. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Untuk mendukung program peningkatan disiplin aparatur, kegiatan yang akan dilaksanakan adalah pengadaan pakaian olah raga/seragam.

D. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Dalam rangka meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karanganyar melaksanakan kegiatan pelatihan kursus ketrampilan.

E. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mendukung program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan adalah :

1. Penyusunan perencanaan, administrasi kegiatan dan pelaporan
2. Penataan dokumen

F. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

Untuk mendukung program tersebut, akan dilaksanakan kegiatan-kegiatan antara lain :

1. Kursus kader pelaksana tingkat B (Suskalak B)
2. Pemantauan orang asing
3. Pemantuan situasi politik, ekonomi dan budaya
4. Piket posko siaga dan piket satlak PBP
5. Pemantauan organisasi terlarang (OT)
6. Penanganan masalah aktual
7. Fasilitasi keamanan umum
8. Pendampingan kelancaran penyelenggaraan pemilu/pilkada

G. Program Peningkatan Pengembangan Wawasan Kebangsaan

Kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mendukung program peningkatan pengembangan wawasan kebangsaan adalah :

1. Meningkatkan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama
2. Meningkatkan rasa solidaritas dan ikatan sosial di masyarakat.
3. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya

4. Fasilitasi hubungan kerja dewan penasehat FKUB/pokja FKUB
5. Fasilitasi hubungan kerja dan pendataan organisasi aliran penghayat kepercayaan kepada Tuhan YME
6. Pendidikan pendahuluan bela negara (PPBN)
7. Forum komunikasi dan konsultasi pemantapan ideologi

H. Program Peningkatan Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan

Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka mencapai program tersebut adalah :

1. Forum wawasan kebangsaan
2. Temu karya kesatuan bangsa
3. Sosialisasi pemantapan nilai-nilai nasionalisme

I. Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan

Dalam upaya meningkatkan pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan maka akan dilaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

1. Pemantauan pelayanan penerbitan riset / survey
2. Kominda (komunitas Intelejen daerah)

J. Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat

Dalam upaya meningkatkan pemberantasan penyakit masyarakat, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karanganyar dengan Badan Narkotika Kabupaten mengadakan kegiatan :

1. Penyuluhan pencegahan peredaran / penggunaan minuman keras dan narkoba (P4GN)
2. Temu pikir remaja & Badan koordinasi Pembinaan pemuda dan Anak Remaja (BKP2AR)

K. Program Peningkatan Pendidikan Politik Masyarakat

Kegiatan yang dilaksanakan dalam upaya meningkatkan pendidikan politik masyarakat antara lain :

1. Pendidikan Politik masyarakat (Sosialisasi Demokrasi)
2. Asistensi bantuan partai politik
3. Asistensi bantuan Ormas & LSM
4. Penyusunan data parpol, ormas dan LSM
5. Fasilitasi hubungan antar lembaga

BAB VI
INDIKATOR KINERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang terkait dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah adalah penyelenggaraan urusan dan pembangunan bidang peningkatan kualitas keagamaan, sosial dan budaya.

Dan program tersebut terdapat pada misi lima (5) dari Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang mana diprogramkan untuk menekankan pentingnya peningkatan partisipasi masyarakat dan lembaga sosial dalam pembangunan kualitas keagamaan, sosial dan budaya demi terciptanya masyarakat yang rukun, damai dan demokratis dalam beragama, sosial dan budaya dalam persatuan dan kesatuan sehingga kesejahteraan secara menyeluruh dapat segera terwujud

Dalam perencanaan lima tahun kedepan maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karanganyar akan berusaha untuk merealisasikan semua program yang telah direncanakan dengan indikasi kegiatan diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Pengembangan Wawasan Kebangsaan

Dalam rangka mencapai program peningkatan pengembangan wawasan kebangsaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik akan melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

1. Meningkatkan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama
2. Meningkatkan rasa solidaritas dan ikatan sosial di masyarakat
3. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya
4. Pendidikan pendahuluan bela negara (PPBN)

2. Program Peningkatan Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan.

Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka mencapai program tersebut adalah :

1. Mengadakan forum wawasan kebangsaan.
2. Temu karya kesatuan bangsa
3. Sosialisasi pemantapan nilai-nilai nasionalisme.

3. Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan

Dalam upaya meningkatkan pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan maka akan dilaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

1. Pemantauan pelayanan penerbitan riset/survey
2. Kominda (komonitas intelejen daerah)

4. Proram Peningkatan Pemberantasan Penyakit Mayarakat.

Dalam upaya meningkatkan pemberantasan penyakit masyarakat, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karanganyar Badan Narkotika Kabupaten mengadakan kegiatan :

1. Penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba (P4GN)
2. Temu fikir remaja dan Badan Koordinasi Pembinaan Pemuda dan Anak Remaja

5. Program Peningkatan Pendidikan Politik Masyarakat

Kegiatan yang dilaksanakan dalam upaya meningkatkan pendidikan politik masyarakat antara lain :

1. Pendidikan politik masyarakat (sosialisasi demokrasi)
2. Asistensi bantuan partai politik
3. Asistensi bantuan Ormas dan LSM
4. Penyusunan data parpol, ormas dan LSM

BAB VII

PENUTUP

Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karanganyar tahun 2013 – 2018 merupakan penjabaran dari visi dan Misi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang mengacu pada RPJMD Kabupaten Karanganyar sebagai pedoman dalam pembangunan bidang Kesatuan Bangsa dan Politik selama lima tahun ke depan. Dokumen rencana strategis (RENSTRA) ini secara normatif memuat program-program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama lima tahun ke depan.

Sebagai acuan pembangunan bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Renstra ini akan dirinci menjadi Rencana Kerja SKPD pada setiap tahunnya selama tahun 2013 sampai dengan 2018. Renstra ini juga akan dijadikan dasar untuk menyusun laporan pelaksanaan Tugas SKPD.

Keberhasilan rencana strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karanganyar tahun 2013-2018 ini perlu dukungan semua stakeholder dan adanya kontrol baik dari pemerintah sendiri, swasta maupun masyarakat sehingga visi dan misi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karanganyar dapat tercapai.

Karanganyar , Februari 2018
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN KARANGANYAR

Agus Cipto Waluyo, SH., MT
Pembina Utama Muda
NIP. 19610822 198903 1 006

LAMPIRAN-LAMPIRAN

TABEL IV
TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-				
				1	2	3	4	5
				2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat serta situasi daerah yang kondusif untuk menunjang pembangunan daerah	Menurunnya potensi konflik antar kelompok masyarakat, suku, ras dan agama	Jumlah konflik	2	1	1	0	0
2	Terwujudnya peningkatan berdemokrasi dan kemandirian dalam rangka menjaga stabilitas politik dalam negeri	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam bidang politik dalam negeri	Persentase angka partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak-hak politik untuk pembangunan daerah	75%	75%	75%	75%	75%

Karanganyar, Februari 2019
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN KARANGANYAR

Agus Cipto Waluyo, SH., MT
Pembina Utama Muda
NIP. 19610822 198903 1 006

TABEL V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2013-2018

MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / SASARAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										UNIT KERJA	LOKASI
						TAHUN - I (2014)		TAHUN - 2 (2015)		TAHUN-3 (2016)		TAHUN-4 (2017)		TAHUN -5 (2018)			
						TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.		
Meningkatkan Kualitas keagamaan, Sosial, dan Budaya	Mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat serta situasi daerah yang kondusif untuk menunjang pembangunan daerah		Persentase penyelesaian konflik di masyarakat			100%	1,503,650,000	100%	1,427,400,000	100%	1,528,400,000	100%	1,614,900,000	100%	2,493,900,000	Badan Kesatuan Bangsa & Politik	Kab Kra
		Menurunnya potensi konflik antar kelompok masyarakat, suku, ras dan agama	Jumlah konflik			2	520,600,000	1	567,200,000	1	593,200,000	0	619,700,000	0	638,200,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Kab Kra
				Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Prosentase kegiatan peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	100%	520,600,000	100%	567,200,000	100%	593,200,000	100%	619,700,000	100%	638,200,000	Badan Kesatuan Bangsa & Politik	Kab Kra
				1. Pemantauan orang asing	Jumlah kegiatan pemantauan orang asing	17 kegiatan	13,000,000	17 kegiatan	18,000,000	17 kegiatan	21,000,000	17 kegiatan	24,500,000	17 kegiatan	24,500,000	Badan Kesatuan Bangsa & Politik	Kab Kra
				2. Piket posko siaga & posko satlak PBP	Jumlah kegiatan piket posko siaga dan satlak PBP	360 kali	40,000,000	360 kali	45,000,000	360 kali	48,000,000	360 kali	51,000,000	360 kali	51,500,000	Badan Kesatuan Bangsa & Politik	Kab Kra

MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / SASARAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										UNIT KERJA	LOKASI
						TAHUN - I (2014)		TAHUN - 2 (2015)		TAHUN-3 (2016)		TAHUN-4 (2017)		TAHUN -5 (2018)			
						TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.		
				3. Pemantauan organisasi terlarang	Jumlah pemantauan organisasi terlarang	75 warga	8,500,000	75 warga	10,000,000	75 warga	13,000,000	75 warga	15,000,000	75 warga	18,000,000	Badan Kesatuan Bangsa & Politik	Kab Kra
				4. penanganan masalah aktual	Jumlah peserta penanganan masalah aktual	100 orang	11,000,000	100 orang	15,000,000	100 orang	18,000,000	100 orang	22,000,000	100 orang	25,000,000	Badan Kesatuan Bangsa & Politik	Kab Kra
				5. Fasilitasi keamanan umum	Jumlah peserta fasilitasi keamanan umum	75 Orang	239,800,000	75 Orang	250,000,000	75 Orang	250,000,000	75 Orang	250,000,000	75 Orang	250,000,000	Badan Kesatuan Bangsa & Politik	Kab Kra
				6. Sosialisasi peran dan fungsi FKDM	Jumlah cakupan wilayah sosialisasi peran dan fungsi FKDM	17 Kec	115,200,000	17 Kec	122,200,000	17 Kec	122,200,000	17 Kec	122,200,000	17 Kec	122,200,000	Badan Kesatuan Bangsa & Politik	Kab Kra
				7. Pemantauan unjuk rasa dan audiensi	Jumlah cakupan wilayah pemantauan unjuk rasa dan audiensi	17 Kec	16,100,000	17 Kec	20,000,000	17 Kec	24,000,000	17 Kec	28,000,000	17 Kec	30,000,000	Badan Kesatuan Bangsa & Politik	Kab Kra
				8. Penanganan gangguan keamanan dlm negeri	Jumlah cakupan wilayah penanganan gangguan keamanan dalam negeri	17 Kec	22,000,000	17 Kec	32,000,000	17 Kec	42,000,000	17 Kec	52,000,000	17 Kec	62,000,000	Badan Kesatuan Bangsa & Politik	Kab Kra
				9. Pemantauan wilayah perbatasan	Waktu pemantauan wilayah perbatasan	1 tahun	35,000,000	1 tahun	35,000,000	1 tahun	35,000,000	1 tahun	35,000,000	1 tahun	35,000,000	Badan Kesatuan Bangsa & Politik	Kab Kra

MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / SASARAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										UNIT KERJA	LOKASI
						TAHUN - I (2014)		TAHUN - 2 (2015)		TAHUN-3 (2016)		TAHUN-4 (2017)		TAHUN -5 (2018)			
						TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.		
				10. Pemantauan ketahanan ekonomi	Waktu pemantauan ketahanan ekonomi	1 tahun	20,000,000	1 tahun	20,000,000	1 tahun	20,000,000	1 tahun	20,000,000	1 tahun	20,000,000	Badan Kesatuan Bangsa & Politik	Kab Kra
				Program pengembangan wawasan kebangsaan	Jumlah cakupan wilayah kegiatan yang dilaksanakan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan berbangsa dan bernegara	17 Kec	76,200,000	17 Kec	94,000,000	17 Kec	110,000,000	17 Kec	124,000,000	17 Kec	144,000,000	Badan Kesatuan Bangsa & Politik	Kab Kra
				1. Fasilitasi hubungan kerja dewan penasehat FKUB	Jumlah kegiatan fasilitasi hubungan kerja dewan penasehat FKUB	17 Kec	22,200,000	17 Kec	28,000,000	17 Kec	32,000,000	17 Kec	35,000,000	17 Kec	40,000,000	Badan Kesatuan Bangsa & Politik	Kab Kra
				2. Fasilitasi hubungan kerja & pendataan organisasi, aliran penghayat kepercayaan Tuhan YME	Jumlah kegiatan fasilitasi hubungan kerja & pendataan organisasi, aliran penghayat kepercayaan Tuhan YME	17 Kec	12,000,000	17 Kec	16,000,000	17 Kec	20,000,000	17 Kec	24,000,000	17 Kec	30,000,000	Badan Kesatuan Bangsa & Politik	Kab Kra

MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / SASARAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										UNIT KERJA	LOKASI
						TAHUN - I (2014)		TAHUN - 2 (2015)		TAHUN-3 (2016)		TAHUN-4 (2017)		TAHUN -5 (2018)			
						TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.		
				3. Pendidikan pendahuluan bela negara	Jumlah kegiatan pendidikan pendahuluan bela negara	150 Orang	19,000,000	150 Orang	25,000,000	150 Orang	28,000,000	150 Orang	30,000,000	150 Orang	34,000,000	Badan Kesatuan Bangsa & Politik	Kab Kra
				4. Fasilitasi hubungan kerja FPBI	Jumlah kegiatan fasilitasi hubungan kerja FPBI	75 Orang	23,000,000	75 Orang	25,000,000	75 Orang	30,000,000	75 Orang	35,000,000	75 Orang	40,000,000	Badan Kesatuan Bangsa & Politik	Kab Kra
																	Kab Kra
				Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan	Prosentase kegiatan kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan	100%	174,500,000	100%	375,000,000	100%	417,000,000	100%	443,000,000	100%	467,000,000	Badan Kesatuan Bangsa & Politik	Kab Kra
				1. Forum wawasan kebangsaan	Jumlah kegiatan forum wawasan kebangsaan	600 Orang	52,000,000	600 Orang	52,000,000	600 Orang	52,000,000	600 Orang	52,000,000	600 Orang	52,000,000	Badan Kesatuan Bangsa & Politik	Kab Kra
				2. Pembinaan kesatuan bangsa	Jumlah kegiatan pembinaan kesatuan bangsa	75 Orang	15,000,000	75 Orang	18,000,000	75 Orang	20,000,000	75 Orang	23,000,000	75 Orang	25,000,000	Badan Kesatuan Bangsa & Politik	Kab Kra
				3. Sosialisasi pemantapan nilai-nilai Nasionalisme	Jumlah sosialisasi pemantapan nilai-nilai nasionalisme	75 Orang	27,500,000	75 Orang	30,000,000	75 Orang	35,000,000	75 Orang	38,000,000	75 Orang	40,000,000	Badan Kesatuan Bangsa & Politik	Kab Kra
				4. Sosialisasi empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara	Jumlah sosialisasi empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara	17 Kec x 100 Orang	80,000,000	17 Kec x 100 Orang	90,000,000	17 Kec x 100 Orang	100,000,000	17 Kec x 100 Orang	110,000,000	17 Kec x 100 Orang	120,000,000	Badan Kesatuan Bangsa & Politik	Kab Kra

MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / SASARAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										UNIT KERJA	LOKASI
						TAHUN - I (2014)		TAHUN - 2 (2015)		TAHUN-3 (2016)		TAHUN-4 (2017)		TAHUN -5 (2018)			
						TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.		
				5. Orientasi ketahanan bangsa	Jumlah kegiatan orientasi ketahanan bangsa		-	17 kec	50,000,000	17 kec	60,000,000	17 kec	70,000,000	17 kec	80,000,000	Badan Kesatuan Bangsa & Politik	Kab Kra
				6. Toleransi & kerukunan dalam kehidupan beragama	Jumlah kegiatan toleransi & kerukunan dalam kehidupan beragama		-	150 Orang	30,000,000	150 Orang	40,000,000	150 Orang	40,000,000	150 Orang	40,000,000	Badan Kesatuan Bangsa & Politik	Kab Kra
				7. Meningkatnya rasa solidaritas dan ikatan soaial di masyarakat	Jumlah kegiatan rasa solidaritas dan kegiatan sosial di masyarakat		-	75 Orang	15,000,000	75 Orang	20,000,000	75 Orang	20,000,000	75 Orang	20,000,000	Badan Kesatuan Bangsa & Politik	Kab Kra
				8. Meningkatnya kesadaran masy nilai nilai luhur budaya	Jumlah kegiatan kesadaran masyarakat nilai-nilai luhur budaya		-	150 Orang	30,000,000	150 Orang	30,000,000	150 Orang	30,000,000	150 Orang	30,000,000	Badan Kesatuan Bangsa & Politik	Kab Kra
				9. Forum komunikasi & konsultasi pemantapan ideologi	Jumlah kegiatan forum komunikasi & konsultasi pemantapan ideologi		-	500 Orang	60,000,000	500 Orang	60,000,000	500 Orang	60,000,000	500 Orang	60,000,000	Badan Kesatuan Bangsa & Politik	Kab Kra
				Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban & keamanan	Prosentase pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	100%	113,000,000	100%	120,000,000	100%	127,000,000	100%	135,000,000	100%	142,500,000	Badan Kesatuan Bangsa & Politik	Kab Kra

MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / SASARAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										UNIT KERJA	LOKASI
						TAHUN - I (2014)		TAHUN - 2 (2015)		TAHUN-3 (2016)		TAHUN-4 (2017)		TAHUN -5 (2018)			
						TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.		
				1. Pemantauan pelayanan penerbitan riset/ survey	Jumlah cakupan wilayah pemantauan pelayanan penerbitan riset/ survey	17 kec	8,000,000	17 kec	10,000,000	17 kec	12,000,000	17 kec	15,000,000	17 kec	17,500,000	Badan Kesatuan Bangsa & Politik	Kab Kra
				2. Temu fikir remaja dan bakor pembinaan pemuda & remaja	Jumlah kegiatan temu fikir remaja dan bakor pembinaan pemuda & remaja	100 orang	15,000,000	100 orang	20,000,000	100 orang	25,000,000	100 orang	30,000,000	100 orang	35,000,000	Badan Kesatuan Bangsa & Politik	Kab Kra
				3. Pemantauan wilayah rawan penyakit masyarakat (pekat)	Jumlah cakupan wilayah pemantauan wilayah rawan penyakit masyarakat (pekat)	17 kec	90,000,000	17 kec	90,000,000	17 kec	90,000,000	17 kec	90,000,000	17 kec	90,000,000	Badan Kesatuan Bangsa & Politik	Kab Kra
	Terwujudnya peningkatan berdemokrasi dan kemandirian dalam rangka menjaga stabilitas politik dalam negeri		Persentase penggunaan hak suara			80%	2,077,400,000	80%	1,084,800,000	80%	1,124,800,000	80%	1,172,800,000	80%	2,808,800,000	Badan Kesatuan Bangsa & Politik	Kab Kra
		Meningkatnya peran serta masyarakat dalam bidang politik dalam negeri	Persentase angka partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak-hak politik untuk pembangunan daerah			75%	1,238,700,000	75%	542,400,000	75%	562,400,000	75%	586,400,000	75%	1,404,400,000	Badan Kesatuan Bangsa & Politik	Kab Kra

MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / SASARAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										UNIT KERJA	LOKASI
						TAHUN - I (2014)		TAHUN - 2 (2015)		TAHUN-3 (2016)		TAHUN-4 (2017)		TAHUN -5 (2018)			
						TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.		
				Program pendidikan politik masyarakat	Persentase pelaksanaan kegiatan pendidikan politik	95%	619,350,000	95%	271,200,000	95%	281,200,000	95%	293,200,000	95%	1,102,200,000	Badan Kesatuan Bangsa & Politik	Kab Kra
				1. Pendidikan politik masyarakat	Waktu pelaksanaan kegiatan pendidikan politik masyarakat	1 tahun	44,400,000	1 tahun	50,000,000	1 tahun	55,000,000	1 tahun	60,000,000	1 tahun	65,000,000	Badan Kesatuan Bangsa & Politik	Kab Kra
				2. Asistensi bantuan Parpol	Jumlah partai politik kegiatan asistensi bantuan parpol	9 partai poltik	19,425,000	9 partai poltik	22,000,000	9 partai poltik	22,000,000	9 partai poltik	23,000,000	9 partai poltik	25,000,000	Badan Kesatuan Bangsa & Politik	Kab Kra
				3. Asistensi bantuan Ormas & LSM	Jumlah Ormas dan LSM dalam kegiatan asistensi bantuan Ormas dan LSM	150 Ormas dan LSM	22,200,000	150 Ormas dan LSM	22,200,000	150 Ormas dan LSM	22,200,000	150 Ormas dan LSM	22,200,000	150 Ormas dan LSM	22,200,000	Badan Kesatuan Bangsa & Politik	Kab Kra
				4. penyusunan data Parpol/ Ormas & LSM	Waktu penyusunan data parpol/ ormas, LSM	150 Ormas dan LSM	8,325,000	150 Ormas dan LSM	22,000,000	150 Ormas dan LSM	22,000,000	150 Ormas dan LSM	23,000,000	150 Ormas dan LSM	25,000,000	Badan Kesatuan Bangsa & Politik	Kab Kra
				5. Sosialisasi Permendagri No. 33 Th 2012 Verifikasi/ audensi pendaftaran Ormas & LSM	Waktu kegiatan sosialisasi Permendagri No. 33 Th 2012 Verifikasi/ audensi pendaftaran Ormas & LSM	1 tahun	100,000,000	1 tahun	100,000,000	1 tahun	100,000,000	1 tahun	100,000,000	1 tahun	100,000,000	Badan Kesatuan Bangsa & Politik	Kab Kra

MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / SASARAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										UNIT KERJA	LOKASI
						TAHUN - I (2014)		TAHUN - 2 (2015)		TAHUN-3 (2016)		TAHUN-4 (2017)		TAHUN -5 (2018)			
						TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.		
				6. Peningkatan pengetahuan berbangsa & bernegara	Jumlah peserta kegiatan peningkatan pengetahuan berbangsa dan bernegara	-	-	100 Orang	25,000,000	100 Orang	25,000,000	100 Orang	25,000,000	100 Orang	25,000,000	Badan Kesatuan Bangsa & Politik	Kab Kra
				7. Fasilitasi hubungan antar lembaga	Waktu kegiatan fasilitasi hubungan antar lembaga	1 tahun	25,000,000	1 tahun	30,000,000	1 tahun	35,000,000	1 tahun	40,000,000	1 tahun	40,000,000	Badan Kesatuan Bangsa & Politik	Kab Kra
				8. Fasilitasi penyeleng garaan pemilu Legislatif	Waktu kegiatan fasilitasi penyelenggaraa n pemilu legislatif	1 tahun	400,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	Badan Kesatuan Bangsa & Politik	Kab Kra
				9. Fasilitasi penyeleng garaan pemilu Gubernur & Bupati	Jumlah cakupan wilayah kegiatan fasilitasi penyelenggaraa n pemilu Gubernur & Bupati	-	-	-	-	-	-	-	-	17 Kecamatan	800,000,000	Badan Kesatuan Bangsa & Politik	Kab Kra
Terwujudnya Masyarakat Yang Demokratis Dalam Persatuan Dan Kesatuan	Meningkat kan pelayanan kepada masyarakat		Persentase peningkatan penunjang pelayanan kepada masyarakat			100%	829,910,143	100%	986,265,000	100%	614,865,000	100%	707,365,000	100%	599,865,000	Badan Kesatuan Bangsa & Politik	Kab Kra
		Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	Persentase peningkatan penunjang pelayanan administrasi perkantoran			100%	829,910,143	100%	986,265,000	100%	614,865,000	100%	707,365,000	100%	599,865,000	Badan Kesatuan Bangsa & Politik	Kab Kra

MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / SASARAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										UNIT KERJA	LOKASI
						TAHUN - I (2014)		TAHUN - 2 (2015)		TAHUN-3 (2016)		TAHUN-4 (2017)		TAHUN -5 (2018)			
						TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.		
				Program pelayanan administrasi perkantoran	Prosentase peningkatan penunjang pelayanan administrasi perkantoran	100%	283,060,143	100%	294,240,000	100%	307,940,000	100%	316,440,000	100%	329,440,000	Badan Kesatuan Bangsa & Politik	Kab Kra
				1. Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah agenda surat menyurat	855 lembar	2,500,000	855 lembar	3,000,000	855 lembar	3,500,000	855 lembar	3,500,000	855 lembar	4,000,000	Badan Kesatuan Bangsa & Politik	Kab Kra
				2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	24,120,143	12 bulan	28,000,000	12 bulan	33,000,000	12 bulan	35,000,000	12 bulan	38,000,000	Badan Kesatuan Bangsa & Politik	Kab Kra
				3. Penyediaan jasa pemeliharaan & perizinan kendaraan dinas/ operasional	Jumlah jasa pemeliharaan & perizinan untuk kendaraan dinas/ operasional	12 unit (rd 4 3 unit, roda dua 9 unit)	4,000,000	12 unit (rd empt 3 unit, roda dua 9 unit)	4,000,000	13 unit (rd empt 4 unit, roda dua 9 unit)	4,500,000	13 unit (rd empt 4 unit, roda dua 9 unit)	5,000,000	13 unit (rd empt 4 unit, roda dua 9 unit)	5,000,000	Badan Kesatuan Bangsa & Politik	Kab Kra
				4. Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah pegawai penerima jasa administrasi	18 orang	44,740,000	18 orang	44,740,000	18 orang	44,740,000	18 orang	44,740,000	18 orang	44,740,000	Badan Kesatuan Bangsa & Politik	Kab Kra
				5. Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis kantor	49 jenis	14,000,000	49 jenis	15,000,000	49 jenis	16,000,000	49 jenis	17,000,000	49 jenis	18,000,000	Badan Kesatuan Bangsa & Politik	Kab Kra
				6. Penyediaan barang cetak dan penggandaan	Jumlah barang cetak dan penggandaan	16 jenis (46.728 item)	15,000,000	16 jenis (46.728 item)	16,000,000	16 jenis (46.728 item)	17,000,000	16 jenis (46.728 item)	18,000,000	16 jenis (46.728 item)	19,000,000	Badan Kesatuan Bangsa & Politik	Kab Kra

MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / SASARAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										UNIT KERJA	LOKASI
						TAHUN - I (2014)		TAHUN - 2 (2015)		TAHUN-3 (2016)		TAHUN-4 (2017)		TAHUN -5 (2018)			
						TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.		
				7. Penyediaan komponen instalansi listrik/ penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalansi listrik/ penerangan bangunan kantor	13 Jenis (402 item)	3,500,000	13 Jenis (402 item)	4,000,000	13 Jenis (402 item)	4,500,000	13 Jenis (402 item)	5,000,000	13 Jenis (402 item)	6,000,000	Badan Kesatuan Bangsa & Politik	Kab Kra
				8. Penyediaan peralatan & perlengkapan kantor	Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	2 unit	12,000,000	2 unit	13,000,000	2 unit	14,000,000	2 unit	15,000,000	2 unit	16,000,000	Badan Kesatuan Bangsa & Politik	Kab Kra
				9. Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah pengadaan peralatan rumah tangga	24 jenis	7,000,000	24 jenis	7,000,000	25 jenis	7,500,000	25 jenis	8,000,000	25 jenis	8,000,000	Badan Kesatuan Bangsa & Politik	Kab Kra
				10. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	40 example	3,500,000	40 example	4,000,000	40 example	5,000,000	40 example	6,000,000	40 example	6,500,000	Badan Kesatuan Bangsa & Politik	Kab Kra
				11. Penyediaan makanan & minuman	Jumlah peserta penyediaan makanan dan minuman	554 orang	11,000,000	554 orang	12,000,000	554 orang	13,000,000	600	14,000,000	600	15,000,000	Badan Kesatuan Bangsa & Politik	Kab Kra
				12. Rapat rapat koordinasi & konsultasi dalam/luar daerah	Jumlah peserta koordinasi & konsultasi dalam/luar daerah	329 orang/hari	71,500,000	329 orang/hari	71,500,000	340	75,000,000	340	75,000,000	345	79,000,000	Badan Kesatuan Bangsa & Politik	Kab Kra
				13. Penyediaan jasa non PNS	Jumlah penyediaan jasa non PNS	12 orang	70,200,000	12 orang	72,000,000	12 orang	70,200,000	12 orang	70,200,000	12 orang	70,200,000	Badan Kesatuan Bangsa & Politik	Kab Kra
				Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Prosentase peningkatan sarana dan prasarana	100%	467,100,000	100%	509,600,000	100%	224,500,000	100%	183,500,000	100%	188,000,000	Badan Kesatuan Bangsa & Politik	Kab Kra

MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / SASARAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										UNIT KERJA	LOKASI
						TAHUN - I (2014)		TAHUN - 2 (2015)		TAHUN-3 (2016)		TAHUN-4 (2017)		TAHUN -5 (2018)			
						TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.		
				Program peningkatan disiplin aparaturnya	Prosentase peningkatan disiplin pegawai	100%	17,000,000	100%	19,675,000	100%	19,675,000	100%	19,675,000	100%	19,675,000	Badan Kesatuan Bangsa & Politik	Kab Kra
				1. Pengadaan pakaian khusus hari hari tertentu	Jumlah pengadaan pakaian khusus	40 potong	7,000,000	41 potong	7,175,000	41 potong	7,175,000	41 potong	7,175,000	41 potong	7,175,000	Badan Kesatuan Bangsa & Politik	Kab Kra
				2. Pengadaan pakaian dinas pegawai	Jumlah pengadaan pakaian dinas pegawai	40 potong	10,000,000	41 potong	12,500,000	41 potong	12,500,000	41 potong	12,500,000	41 potong	12,500,000	Badan Kesatuan Bangsa & Politik	Kab Kra
				Program peningkatan kapasitas sumber daya aparaturnya	Prosentase peningkatan kapasitas SDM dan kinerja pelayanan	100%	12,000,000	100%	112,000,000	100%	12,000,000	100%	137,000,000	100%	12,000,000	Badan Kesatuan Bangsa & Politik	Kab Kra
				1. Peningkatan SDM/ pelatihan kursus ketrampilan	Jumlah peserta peningkatan SDM	32 orang/hari	12,000,000	32 orang/hari	12,000,000	32 orang/hari	12,000,000	32 orang/hari	12,000,000	32 orang/hari	12,000,000	Badan Kesatuan Bangsa & Politik	Kab Kra
				2. Study banding untuk meningkatkan kinerja	Jumlah peserta study banding untuk meningkatkan kinerja	-	-	41 orang	100,000,000	-	-	41 orang	125,000,000	-	-	Badan Kesatuan Bangsa & Politik	Kab Kra
				Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan pencapaian kinerja & keuangan	Prosentase Peningkatan kualitas penyusunan perencanaan dan pelaporan	100%	50,750,000	100%	50,750,000	100%	50,750,000	100%	50,750,000	100%	50,750,000	Badan Kesatuan Bangsa & Politik	Kab Kra
				1. Penyusunan laporan akuntabilitas dan laporan keuangan	Jumlah laporan keuangan yang disusun	6 lporan	32,000,000	6 lporan	32,000,000	6 lporan	32,000,000	6 lporan	32,000,000	6 lporan	32,000,000	Badan Kesatuan Bangsa & Politik	Kab Kra

MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / SASARAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										UNIT KERJA	LOKASI
						TAHUN - I (2014)		TAHUN - 2 (2015)		TAHUN-3 (2016)		TAHUN-4 (2017)		TAHUN -5 (2018)			
						TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.		
				2. Penataan dokumen	Jumlah kegiatan penataan dokumen	10 kegiatan	18,750,000	10 kegiatan	18,750,000	10 kegiatan	18,750,000	10 kegiatan	18,750,000	10 kegiatan	18,750,000	Badan Kesatuan Bangsa & Politik	Kab Kra
	BELANJA TIDAK LANGSUNG																
	BELANJA BANTUAN SOSIAL																
	BELANJA BANTUAN SOSIAL KEPADA ORGANISASI SOSIAL KEMASYARAKATAN																
	Meningkatkan kinerja organisasi sosial kemasyarakatan dalam berpartisipasi pembangunan keamanan	Meningkatnya kinerja dan partisipasi organisasi sosial kemasyarakatan	Terprogramnya bantuan sosial kepada organisasi sosial kemasyarakatan	Program bantuan sosial kepada organisasi sosial kemasyarakatan													
				1. Fasilitasi kegiatan ormas & LSM	Terfasilitasinya kegiatan Ormas & LSM	1 tahun	185,000,000	1 tahun	185,000,000	1 tahun	185,000,000	1 tahun	185,000,000	1 tahun	185,000,000	Badan Kesatuan Bangsa &	Kab Kra
				2. Fasilitasi nya bantuan kepada badan narkoba daerah	Terfasilitasinya bantuan kegiatan BNK	1 tahun	400,000,000	1 tahun	400,000,000	1 tahun	400,000,000	1 tahun	400,000,000	1 tahun	400,000,000	Badan Kesatuan Bangsa & Politik	Kab Kra
				3. Fasilitasi bantuan kepada KOMINDA	Terfasilitasinya bantuan kepada KOMINDA	1 tahun	70,000,000	1 tahun	70,000,000	1 tahun	70,000,000	1 tahun	70,000,000	1 tahun	70,000,000	Badan Kesatuan Bangsa & Politik	Kab Kra
				4. Fasilitasi bantuan kepada FKUB	Terfasilitasinya bantuan kepada FKUB	1 tahun	2,350,000	1 tahun	2,350,000	1 tahun	2,350,000	1 tahun	2,350,000	1 tahun	2,350,000	Badan Kesatuan Bangsa & Politik	Kab Kra
				5. Fasilitasi bantuan kepada partai politik	Terfasilitasinya bantuan kepada partai politik	1 tahun	955,000,000	1 tahun	955,000,000	1 tahun	955,000,000	1 tahun	955,000,000	1 tahun	955,000,000	Badan Kesatuan Bangsa & Politik	Kab Kra
				6 Fasilitasi nya bantuan hibah kepada FKDM	Terfasilitasinya bantuan hibah kepada FKDM	1 tahun	100,000,000	1 tahun	100,000,000	1 tahun	100,000,000	1 tahun	100,000,000	1 tahun	100,000,000	Badan Kesatuan Bangsa & Politik	Kab Kra

MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / SASARAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										UNIT KERJA	LOKASI
						TAHUN - I (2014)		TAHUN - 2 (2015)		TAHUN-3 (2016)		TAHUN-4 (2017)		TAHUN -5 (2018)			
						TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.		
				7 Fasilitasi nya bantuan hibah kepada MUI	Terfasilitasinya bantuan hibah kepada MUI	1 tahun	40,000,000	1 tahun	40,000,000	1 tahun	40,000,000	1 tahun	40,000,000	1 tahun	40,000,000	Badan Kesatuan Bangsa & Politik	Kab Kra
				8 Fasilitasi nya bantuan hibah kepada LVRI	Terfasilitasinya bantuan hibah kepada LVRI	1 tahun	250,000,000	1 tahun	250,000,000	1 tahun	250,000,000	1 tahun	250,000,000	1 tahun	250,000,000	Badan Kesatuan Bangsa & Politik	Kab Kra
				9 Fasilitasi bantuan hibah kepada DHC 45 Kra	Terfasilitasinya bantuan hibah kepada DHC 45 Kra	1 tahun	25,000,000	1 tahun	25,000,000	1 tahun	25,000,000	1 tahun	25,000,000	1 tahun	25,000,000	Badan Kesatuan Bangsa & Politik	Kab Kra
				10 Fasilitasi bantuan hibah kepada PC Muh Jaten	Terfasilitasinya bantuan hibah kepada PC Muh Jaten	1 tahun	10,000,000	1 tahun	10,000,000	1 tahun	10,000,000	1 tahun	10,000,000	1 tahun	10,000,000	Badan Kesatuan Bangsa & Politik	Kab Kra
				11 Fasilitasi bantuan hibah kepada GP Ansor Krpd	Terfasilitasinya bantuan hibah kepada GP Ansor Krpd	1 tahun	7,500,000	1 tahun	7,500,000	1 tahun	7,500,000	1 tahun	7,500,000	1 tahun	7,500,000	Badan Kesatuan Bangsa & Politik	Kab Kra
				12 Fasilitasi bantuan hibah kepada Kerta Werda Tama	Terfasilitasinya bantuan hibah kepada Kerta Werda Tama	1 tahun	5,000,000	1 tahun	5,000,000	1 tahun	5,000,000	1 tahun	5,000,000	1 tahun	5,000,000	Badan Kesatuan Bangsa & Politik	Kab Kra

Karanganyar, Februari 2019
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN KARANGANYAR

Agus Cipto Waluyo, SH., MT
Pembina Utama Muda
NIP. 19610822 198903 1 006